

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha yang terjadi di suatu negara menggambarkan sisi dinamika masyarakat negara tersebut. Dunia usaha adalah pihak yang paling dominan dalam menghasilkan barang dan jasa (*good and service*) terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹ Pertumbuhan perekonomian di Indonesia tak terlepas dari keberadaan sektor-sektor usaha yang berkembang di dalamnya. Salah satu sektor usaha yang patut mendapat perhatian dari pemerintah karena turut memberikan kontribusi bagi perekonomian negara adalah usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).²

Dewasa ini, perkembangan sektor usaha mikro menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun yaitu sebesar 7% – 8% setiap tahunnya. Data Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, pada tahun 2013 menunjukkan bahwa ada 56,5 juta UMKM di Indonesia yang

¹ Irham Fahmi & Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Perkreditan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 50.

² Pasal 1 Ayat 5 PBI No. 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangann Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

telah menyumbang 90% pertumbuhan ekonomi Indonesia.³ Keberadaan usaha mikro ini akan membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran serta melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Persaingan dunia usaha yang semakin ketat merupakan sebuah tantangan bagi usaha mikro. Selain itu, sebagian besar usaha mikro juga mendapat hambatan untuk kemajuan usahanya. Pada umumnya, hambatan yang biasa dihadapi oleh para pelaku usaha adalah masalah keterbatasan keuangan (*finance*), keterbatasan ilmu (*knowledge*), dan keterbatasan pengalaman (*experience*).⁴ Dari ketiga hambatan tersebut, hambatan yang paling dominan dialami oleh pelaku usaha mikro terletak pada faktor keuangan atau permodalan. Aspek-aspek permodalan yang dapat menghambat kemajuan usaha mikro, antara lain seperti pembiayaan modal usaha, akumulasi permodalan, serta penambahan fasilitas penunjang usaha.

Menurut Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁵ Berdasarkan UU tersebut jelas bahwa lembaga keuangan maupun pemerintah wajib untuk

³ Ferry Koto, “*Tahun 2014 Ekonomi Menurun, Koperasi Berjaya, UMKM Semakin Kuat*”, dalam <http://ferrykoto.wordpress.com/2013/12/20/tahun-2014-ekonomi-menurun-koperasi-berjaya-umkm-semakin-kuat/>, diakses pada 01 April 2014.

⁴ Irham Fahmi & Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Perkreditan ...*, 50.

⁵ Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

turut andil dan membantu pendanaan dalam rangka pemberdayaan serta pengembangan usaha mikro.

Peranan lembaga perbankan kini memang sangat dibutuhkan untuk menunjang permodalan usaha mikro. Di Indonesia, selain terdapat bank umum (bank konvensional), juga terdapat bank syariah. Sejak berlakunya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah mulai gencar bersaing dengan bank konvensional. Bank syariah juga gencar dalam membidik sektor mikro yang merupakan pasar potensial. Menjamurnya keberadaan usaha mikro dimanfaatkan oleh bank syariah untuk turut menyalurkan pembiayaan dan membantu mengatasi masalah permodalan yang selama ini dihadapi para pelaku usaha mikro. Adanya bentuk pembiayaan untuk usaha mikro ini menunjukkan bahwa bank syariah juga turut berkontribusi dalam perkembangan usaha mikro di Indonesia.

Bank syariah hadir dan diharapkan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro dalam memperoleh bantuan permodalan. Namun, karakter para pemilik usaha mikro yang pada umumnya *unbankable* terkadang menjadi suatu penghalang dalam memperoleh bantuan permodalan dari lembaga keuangan seperti perbankan. Karena pada umumnya, memperoleh pembiayaan dari perbankan memang tidak mudah. Begitu banyak persyaratan serta prosedur yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh para calon debitur. Selain itu, para pemilik usaha mikro

terkadang juga terbebani dengan jaminan/agunan yang harus diserahkan pada pihak perbankan untuk bisa mengcover pembiayaannya.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah juga tak terlepas dari berbagai risiko yang harus ditanggung di kemudian hari. Pihak perbankan harus pandai-pandai dalam menganalisis kemungkinan risiko yang akan terjadi. Setiap pembiayaan yang diberikan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan selalu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan. Kewajiban bank untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian ini yang selanjutnya mengharuskan pihak bank untuk melakukan manajemen pengawasan risiko dalam operasionalnya.⁶

Dibutuhkan pula sebuah pengendalian internal yang harus dilakukan oleh setiap lembaga perbankan untuk menjaga setiap aset yang dimiliki dari kemungkinan risiko pembiayaan yang terjadi. Secara luas, pengendalian internal dapat diartikan sebagai serangkaian prosedur serta proses yang digunakan perusahaan untuk mengolah informasi secara akurat, serta memastikan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku.⁷ Berdasarkan pada SE No. 5/22/DPNP tanggal 23 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, menyatakan bahwa:

⁶ Misbahul Munir, *Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 59.

⁷ James M Reeve, et.al., *Pengantar Akuntansi – Adaptasi Indonesia*, Damayanti Dian jilid 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 387.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.⁸

PT BNI Syariah merupakan salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang dalam kegiatan operasionalnya juga memberikan pembiayaan kepada usaha mikro. Melihat bahwa pasar mikro merupakan pasar yang potensial untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi, PT BNI Syariah mulai menggencarkan usahanya untuk membidik sektor mikro. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya outlet-outlet mikro yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di tahun 2012, PT BNI Syariah telah berhasil membuka 61 outlet mikro, dan di akhir tahun 2013 mereka mampu memperluas jaringannya menjadi 81 outlet mikro yang tersebar di berbagai daerah. Total pembiayaan mikro hingga akhir tahun 2013 mencapai 850 milyar rupiah.⁹

BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya merupakan salah satu jaringan kantor cabang PT BNI Syariah divisi mikro yang berada di kawasan Rungkut–Surabaya dan beroperasi sejak bulan Juni 2012. Dibukanya outlet mikro di Surabaya merupakan salah satu bukti

⁸ SE No. 5/22/DPNP, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, “*Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum*”.

⁹ Darandono, “*Tahun 2014 BNI Syariah Bidik Pembiayaan Mikro di Indonesia Timur*” dalam <http://swa.co.id/business-strategy/tahun-2014-bni-syariah-bidik-pembiayaan-mikro-di-indonesia-timur>, diakses pada 04 April 2014.

pemenuhan kebutuhan bagi para pelaku usaha mikro yang berada di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Target sasaran yang dibidik oleh BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya banyak berasal dari para pelaku usaha mikro yang beroperasi di pasar-pasar tradisional. Acit selaku analis pembiayaan mikro BNI Syariah, menyatakan bahwa:

Sesuai dengan ketentuan perusahaan, segmentasi BNI Syariah Mikro adalah perorangan yang memiliki usaha mikro baik yang beroperasi di pasar-pasar ataupun yang memiliki usaha warung atau toko di rumahnya. Pada mulanya, kawasan yang dibidik oleh BNI Syariah KC Mikro Rungkut adalah calon nasabah yang wilayah usahanya berada di radius 10km dari Kantor Cabang. Namun, sekarang kita bisa mencakup seluruh wilayah Surabaya.¹⁰

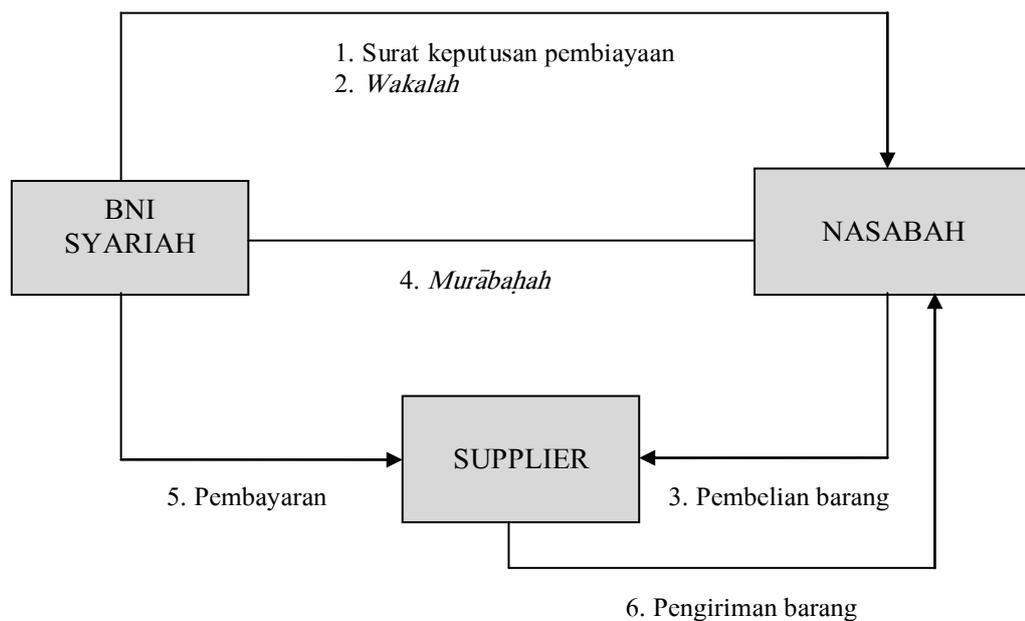
Melihat segmentasi yang dibidik oleh BNI Syariah KC Rungkut Surabaya yang notabene merupakan pelaku usaha mikro, maka pembiayaan yang disalurkan pasti tidak terlepas dari risiko, meskipun kapasitas/plafon pembiayaan yang diberikan tidak cukup besar yaitu antara Rp 5.000.000,- sampai Rp 500.000.000,-. Akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan mikro ini adalah akad *murābahah*. Akad ini digunakan dalam 2 jenis produk pembiayaan, yaitu produk pembiayaan mikro 2iB hasanah dengan plafon Rp 5.000.000,- sampai Rp 50.000.000,- dan produk pembiayaan mikro 3iB hasanah dengan plafon Rp 50.000.000,- sampai Rp 500.000.000,-.

Murābahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Pada perjanjian *murābahah*, bank membiayai pembelian barang yang

¹⁰ Dwiyacitta, *Wawancara*, BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya, 02 Juni 2014.

dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di *mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.¹¹

Tabel 1.1
Skema Pembiayaan *Murābahah*¹²



Meskipun akad pembiayaan yang digunakan adalah akad *murābahah*, dan keuntungan yang akan didapat dari penyaluran pembiayaan tersebut sudah pasti dan tidak tergantung pada bagi hasil, namun pihak bank juga tetap harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan risiko yang bisa terjadi kemudian hari. Untuk meminimalisir berbagai risiko yang mungkin terjadi seperti pembiayaan

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), 69.

¹² Buku Pedoman Prosedur Pembiayaan Mikro BNI Syariah Divisi Mikro.

macet, maka setiap staf *marketing* BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya dibekali dengan SOP dalam menyalurkan pembiayaan mikro. SOP ini merupakan pedoman bagi seorang *marketing* ataupun analis pembiayaan agar pembiayaan yang disalurkan bisa tepat sasaran dan juga tidak melenceng dari prinsip syariah.

Diperlukan juga suatu pengendalian internal yang dilakukan pihak BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya agar setiap pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan dan juga meminimalisir risiko. Tujuan utama dari pengendalian risiko pembiayaan adalah menjaga agar semua aktivitas pembiayaan mikro tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan atau membahayakan kelangsungan usaha, serta memastikan semua proses pembiayaan dilakukan sesuai pedoman pembiayaan bisnis mikro.¹³ Pentingnya pengendalian internal juga diungkapkan oleh analis pembiayaan BNI Syariah Mikro, yang menyatakan bahwa:

Pengendalian internal sangat dibutuhkan di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya untuk meminimalisir risiko dan menjaga aset perusahaan (pembiayaan yang telah disalurkan). Pengendalian internal diperlukan mengingat bahwa setiap pegawai dibebani target, dimana setiap pegawai (*marketing*) harus mampu mencapai plafond pembiayaan sebesar 250juta/bulan dengan spesifikasi minimal 4 NOA (*Number Of Acoount*). Dengan adanya target tersebut, maka terkadang seorang pegawai bisa saja tak peduli dengan segala macam prosedur yang dibuat perusahaan saat dia berada pada posisi terdesak. Apapun bisa dilakukan termasuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yang seharusnya tidak layak untuk diberikan pembiayaan. Maka dari itu, di BNI Syariah Mikro terdapat pengendalian atau pengawasan berlapis, yaitu

¹³ Ibid.

Control 1 yang dilakukan oleh analis pembiayaan dan *Control 2* yang dilakukan oleh *Control Intern*.¹⁴

Pelaksana pengendalian internal di BNI Syariah KC Rungkut Surabaya dilakukan oleh Kontrol Internal Mikro (KIM). Pengendalian atau pengawasan internal dilakukan setiap tiga bulan sekali, bahwa seorang audit internal melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pembiayaan ataupun operasional semua telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁵ Seorang audit internal pembiayaan di sini akan melakukan pengecekan secara administratif dan memastikan kebenaran data-data nasabah pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Pembiayaan Usaha Sektor Mikro di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya”**.

B. Identikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi pembiayaan usaha sektor mikro bagi perkembangan UMKM di Indonesia.
2. Risiko pembiayaan usaha sektor mikro yang terjadi di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya.

¹⁴ Dwiyacitta, *Wawancara*, BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya, 02 Juni 2014.

¹⁵ Bagus, *Wawancara*, BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya, 02 Juni 2014.

3. Prosedur pembiayaan usaha sektor mikro di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya.
4. Penerapan sistem pengendalian internal pada pembiayaan usaha sektor mikro di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya.

Dari identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan pada usaha sektor mikro di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya.
2. Penerapan sistem pengendalian internal pada pembiayaan usaha sektor mikro di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pada pembiayaan usaha sektor mikro di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya?
2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pada pembiayaan usaha sektor mikro di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis untuk penelitian ini, penulis memperoleh data penelitian yang membahas

dengan topik serupa. Berikut adalah hasil beberapa penelitian yang membahas tentang pengendalian internal, antara lain:

1. “Analisis Pengendalian Internal Pada Prosedur Penyaluran Pembiayaan di BPRS Al Salam” oleh Martha Adryan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Penelitian ini membahas tentang SOP pembiayaan yang terdapat pada BPRS, prosedur pembiayaannya, serta pengaplikasian pengendalian internal pada prosedur pembiayaannya. Dari hasil penelitian, dinyatakan bahwa prosedur yang dimiliki oleh BPRS sudah cukup baik dan memenuhi syarat untuk pengendalian internal, namun dari sisi penerapan pengendalian internal oleh karyawan yang bersangkutan masih kurang maksimal dan membutuhkan evaluasi secara intensif.¹⁶
2. “Analisis Sistem Pengendalian Internal Penggajian Karyawan Pada BMT Al Ikhlas Yogyakarta” oleh Ika Haripratiwi, Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta, 2006. Penelitian ini membahas tentang penilaian fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem penggajian karyawan, menilai jaringan prosedur penggajian, serta menilai sistem pengendalian internal dalam penggajian karyawan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengendalian internal penggajian yang dilakukan oleh pihak BMT sudah cukup memadai karena sudah adanya pemisahan tugas dan tanggungjawab dalam struktur

¹⁶ Martha Adryan, “*Analisis Pengendalian Internal Pada Prosedur Penyaluran Pembiayaan di BPRS Al Salam*”, (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

organisasinya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik, serta praktik yang sehat dalam melaksanakan fungsi tiap unit organisasinya.¹⁷

3. “Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penjualan (Ekspor) studi kasus pada perusahaan Putra Wahyu Rotan Sukoharjo” oleh Heni Puji Asrini, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2003. Dalam penelitian ini peneliti melakukan evaluasi terhadap perusahaan tentang pengendalian intern yang dilakukan pada sistem penjualan ekspor yang dilakukan perusahaan. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa pengendalian intern terhadap penjualan ekspor yang dilakukan telah berjalan secara efektif dan memenuhi segala aspek yang mencakup dalam sistem pengendalian intern.¹⁸

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Usaha Sektor Mikro pada BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya”. Meskipun penelitian di atas sama-sama membahas tentang sistem pengendalian internal, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang tertera di atas adalah pada penelitian pertama, peneliti memilih BPRS yang memang khusus menangani pembiayaan mikro.

¹⁷ Ika Haripratiwi, “*Analisis Sistem Pengendalian Internal Penggajian Karyawan Pada BMT Al Ikhlas Yogyakarta*”, (Skripsi--STAIN Surakarta, 2006).

¹⁸ Heni Puji Asrini, “*Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penjualan (Ekspor) studi kasus pada perusahaan Putra Wahyu Rotan Sukoharjo*”, (Skripsi--Universitass Sebelas Maret Surakarta, 2003).

Sedangkan penelitian ini memilih bank umum syariah yaitu BNI Syariah yang pada dasarnya tak hanya memberikan pembiayaan pada sektor mikro saja. Sedangkan pada penelitian kedua, perbedaannya terletak pada fokus objek penelitiannya, dimana pada penelitian tersebut fokus pada sistem penggajian pada karyawan. Penelitian ketiga, objek penelitiannya tampak lebih fokus pada sistem penjualan ekspor.

Dari situ jelas bahwa terdapat perbedaan objek penelitian yang terdahulu dengan yang sekarang. Penelitian sekarang fokus pada pemberian pembiayaan untuk usaha mikro pada bank syariah, yaitu BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui tentang prosedur pada pembiayaan usaha sektor mikro di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya.
2. Untuk mengetahui tentang penerapan sistem pengendalian internal pada pembiayaan usaha sektor mikro di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat setidaknya dalam dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis: hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan tentang penerapan sistem pengendalian internal pada pembiayaan usaha sektor mikro pada BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya.
2. Aspek praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk melakukan evaluasi dan pengendalian internal bagi para praktisi BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya dalam melakukan penyaluran pembiayaan usaha sektor mikro. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi atau rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa.

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman skripsi ini, maka peneliti memberikan deskripsi pada beberapa istilah, meliputi:

1. Sistem Pengendalian Internal adalah rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivasnya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, memastikan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijakan yang telah ditetapkan.¹⁹ Yang dimaksud Sistem Pengendalian Internal dalam penelitian ini adalah serangkaian kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya sebagai upaya untuk mengamankan aset, menjaga

¹⁹ Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 59.

keandalan informasi akuntansi yang akurat, serta menjaga ketaatan terhadap kebijakan yang telah dibuat dan memastikannya agar tidak melenceng dari perundang-undangan.

2. Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah.²⁰ Pembiayaan dalam penelitian ini berarti kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya kepada calon nasabah yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya.
3. Usaha sektor mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).²¹ Yang dimaksud usaha sektor mikro dalam penelitian ini adalah usaha perseorangan yang berskala mikro yang diberikan fasilitas pembiayaan oleh BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya dengan plafon mulai dari Rp 5.000.000,- sampai Rp 500.000.000,-.
4. BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya adalah salah satu bank syariah yang merupakan jaringan kantor cabang dari PT BNI Syariah

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 105.

²¹ Pasal 1 Ayat 5 PBI No. 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangann Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

yang beroperasi dalam divisi mikro dan bertempat di Jalan Raya Kali Rungkut No. 5 Pertokoan Rungkut Megah Raya Blok A-2 Surabaya.

H. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang obyektif, maka diperlukan suatu metode penelitian. Metode ini merupakan pedoman yang digunakan oleh peneliti dalam rangka melaksanakan penelitian.

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka data yang akan dikumpulkan oleh peneliti antara lain:

a. Data primer, yang meliputi:

- 1) Data tentang prosedur pelaksanaan pembiayaan usaha sektor mikro di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya.
- 2) Data tentang penerapan Sistem Pengendalian Internal pada pembiayaan usaha sektor mikro di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya.

b. Data sekunder, yang meliputi:

- 1) Teori tentang Sistem Pengendalian Internal
- 2) Teori tentang manajemen risiko perbankan
- 3) Teori tentang pembiayaan bank syariah
- 4) Buku Pedoman Pembiayaan Mikro Syariah

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek penelitian yang berupa benda atau orang yang di dalamnya melekat tentang objek penelitian.²² Data penelitian ini berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, kuisisioner, dan lain sebagainya.²³ Dalam penelitian ini, sumber primer bersumber dari hasil wawancara dan observasi terhadap staf analisis pembiayaan, staf audit internal, dan staf *marketing* pembiayaan di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder merupakan pelengkap data primer, dimana data sekunder memuat teori-teori, sedangkan data primer merupakan bentuk prakteknya.²⁴ Sumber sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku atau literatur lain, meliputi:

- 1) Mardi, Sistem Informasi Akuntansi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

²² Ismail Nawawi Uha, *Metoda Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 179.

²³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

²⁴ Ibid, 88.

- 2) SE No. 5/22/DPNP tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
- 3) Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, *Auditing: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- 4) M James Reeve, et.al, *Pengantar Akuntansi – Adaptasi Indonesia* jilid 1, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- 5) Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- 6) Tariqullah Khan & Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- 7) Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- 8) Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- 9) Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan teknik-teknik dalam pengumpulan data. Diantara teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Teknik Observasi/Pengamatan

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian yang telah diamati oleh peneliti.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipatif, dimana peneliti tidak melibatkan diri ke dalam objek observasi secara langsung namun hanya melakukan pengamatan sepintas pada saat tertentu.²⁶

Di sini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan operasional BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Internal pada pembiayaan usaha sektor mikro. Hasil pengamatan kemudian dinarasikan sesuai dengan fakta di lapangan.

b. Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.²⁷ Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, di mana pertanyaan yang disampaikan oleh

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 142.

²⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik...*, 66.

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial...*, 134.

pewawancara bersifat terbuka yang jawabannya tidak terbatas namun masih dalam lingkup tema yang telah ditentukan.²⁸

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terkait dalam tema penelitian ini, yaitu para pegawai BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya yang terdiri dari staf analis pembiayaan (*Account Officer*), staf audit internal, dan *marketing* pembiayaan.

c. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi.²⁹ Metode dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai variabel penelitian yang berupa catatan, transkrip, arsip, dan dokumen yang lainnya.³⁰

Peneliti mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti dokumen tentang form pengajuan pembiayaan dan akad pembiayaan.

4. Teknik Pengolahan Data

Beberapa teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

²⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 123.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010), 422.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 229.

- a. *Editing*, yaitu proses memeriksa data yang sudah terkumpul, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, dan relevansi jawaban dengan tema penelitian yang dilakukan.
- b. *Organizing*, yaitu kegiatan/proses mengatur dan menyusun kembali data yang di telah didapatkan dari hasil penelitian menjadi suatu kesatuan yang teratur dan mengelompokkannya secara sistematis.
- c. *Analizing*, yaitu proses menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk kemudian diambil kesimpulannya sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptif analitis, dimana peneliti memaparkan hasil penelitian berdasarkan situasi yang telah diteliti yang kemudian dinarasikan dalam bentuk uraian naratif. Peneliti menggunakan metode ini, karena penelitian bersifat deskriptif kualitatif yang menghasilkan data berupa narasi dari hasil wawancara,

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis...*, 427.

observasi, dan analisis dokumen yang didapat, sehingga hasil penelitian tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Dengan deskriptif analitis, peneliti akan memaparkan tentang prosedur pembiayaan usaha sektor mikro dan penerapan Sistem Pengendalian Internal pada BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya.

Analisis data dilakukan dengan pola pikir deduktif, yaitu metode berpikir bertolak dari hal yang umum ke hal yang bersifat khusus. Berdasarkan sesuatu yang umum tersebut, kemudian ditarik sebuah kesimpulan tentang hal-hal yang khusus berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Di sini peneliti juga berusaha untuk menemukan kelebihan ataupun kekurangan dari penerapan Sistem Pengendalian Internal pada pembiayaan usaha mikro di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori yang terdiri dari 2 sub bab. Pertama, mengenai Sistem Pengendalian Internal dan SE (Surat Edaran) No.5/22/DPNP, yang meliputi pengertian, tujuan, unsur, dan elemen-

elemen sistem pengendalian internal. Kedua mengenai pembiayaan usaha mikro yang meliputi pengertian dan fungsi pembiayaan, pembiayaan *murābahah*, analisis pembiayaan, dan manajemen risiko pembiayaan.

Bab ketiga, menguraikan tentang deskripsi hasil penelitian yang memuat tentang gambaran umum BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya, produk pembiayaan BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya dan prosedurnya, serta penerapan sistem pengendalian internal pada BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya.

Bab keempat, menguraikan hasil penelitian dan analisis yang memuat tentang hasil analisis terhadap prosedur pada pembiayaan usaha sektor mikro dan analisis terhadap penerapan sistem pengendalian internal pada pembiayaan usaha sektor mikro di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.